

PENGARUH RELASI MELAYU NUSANTARA DALAM MEMPERERAT INTEGRASI SOSIAL MENUJU PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

Sem Touwe, Gazali Far-Far

*Pendidikan Sejarah, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura.

*Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura.

ARTICLE INFORMATION

Submitted	: 27 Agustus 2021
Review	: 21 September 2021
Accepted	: 13 Oktober 2021
Published	: 31 Oktober 2021
Available Online	: 1 November 2021

KEYWORDS

Malay Language, Social Integration, the Nation State.

CORRESPONDANCE

E-mail: semtouwe63@gmail.com
farfargazali@gmail.com

ABSTRACT

Since the past, the Malays have been known as a maritime community and generally inhabit the western part of the archipelago, without realizing it, have played an active role in social relations to build solidarity to form a unity towards a nation state by prioritizing the symbol of the Malay language. To what extent is the role of the Malay language and Malay relations in the process of building the solidarity of the people of the Archipelago, then to answer the questions mentioned above, this paper aims to; (1) Explain the role of the Malay language as a cultural symbol of the glue of tribes, nations, in the archipelago. (2) Malay history and culture strengthen National Integration. (3) Consensus to legitimize Indonesian as the language of unity. The data and information in this paper are the result of a literature review of various research reports, book reviews. and documents that aim to describe theories and information both past and present, to then organize the libraries needed for analysis purposes. The results of the analysis show that with the relations of the Malays in the archipelago both in the fields of trade and culture, solidarity between tribes, ethnicities, and groups can be built properly through symbols, especially the Malay language, and then has positive implications for the process of forming a nation state.

A. Pendahuluan

Ketika sejumlah simbol diangkat dan diakui sebagai ekspresi jati diri suatu suku bangsa atau bangsa, maka simbol-simbol itu secara langsung atau tidak langsung menyatukan individu warga suku bangsa atau bangsa tersebut. Setiap warga suku bangsa kemudian merasa memiliki sejumlah sarana ekspresi jati diri yang sama. Pemakaian simbol sebagai ekspresi jati diri bertujuan secara positif untuk membangkitkan solidaritas yang

bersifat mekanis, yaitu solidaritas yang didasarkan pada homogenitas nilai dan perilaku, kesetiaan pada tradisi dan relasi kekerabatan (Durkheim, 1966: 74). Disinilah unsur kebudayaan berupa simbol tertentu terutama bahasa berfungsi, tidak hanya sebagai ekspresi jati diri melainkan sekaligus sebagai sarana integrasi sosial bagi suatu warga suku bangsa. Bahasa Melayu dalam periodisasi catatan sejarah Indonesia misalnya, telah terserap lewat relasi orang-orang Melayu

dengan sejumlah komunitas lokal di wilayah Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa maupun Arab di negeri ini. Bahasa Melayu juga tersosialisasi lewat proses Islamisasi diberbagai daerah di Nusantara terutama dalam hal penyampaian dakwa atau khotba yang disampaikan oleh para pendakwa.

Bukti bukti penggunaan bahasa Melayu dalam penyiaran Islam misalnya, ditemukannya beberapa naska kuno yang dipergunakan saat pelaksanaan khotba Jumat. Umumnya materi khotba ditulis pada Al-Quran gulungan dengan menggunakan bahasa Melayu tua dan juga bahasa Arab. Al-Quran gulungan yang ditulis oleh cucu Imam Kulapessy yang tersimpan di Masjid Tua Wapaue di negeri Kaitetu pulau Ambon misalnya, masih menggunakan bahasa Melayu tua dengan huruf Arab gundul, (Tulisan Arab yang tidak menggunakan tanda-tanda baca atau disebut juga tulisan Arab gundul. Sebahagian besar Masyarakat Jawa menyebutnya huruf Pegon). Contoh yang sama misalnya pada hikayat dan tambo di Sumatera, umumnya menggunakan bahasa Melayu tua dengan huruf Arab atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Arab-Melayu. Beberapa prasasti seperti Talang Tuo, Kedukan Bukit, dan Kota Kapur yang ditulis pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya di abad ke 7, semuanya menggunakan bahasa Melayu tua. Selain itu prasasti Sojometro yang ditemukan di Pekalongan pulau Jawa pada abad ke 7 telah menggunakan bahasa Melayu tua (Harimurti Kridalaksana, 1991). Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah dikenal

oleh masyarakat di Nusantara sebagai *lingua franca*, jauh melampaui anasir-anasir bahasa Arab yang diperkenalkan oleh para pedagang dan para penyiar Islam maupun bahasa Latin dan bahasa Belanda yang disosialisasikan oleh orang-orang Eropa pada setiap perjumpaan baik secara formal maupun non formal.

Dengan demikian jelaslah bahwa bahasa Melayu telah berfungsi secara positif dalam hal pembentukan integrasi sosial antar berbagai etnis dan suku di Nusantara sejak lampau. Bahasa Melayu yang tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui relasi orang-orang Melayu dapat diterima oleh masyarakat Nusantara yang dikenal sebagai wilayah dengan penduduk majemuk. Penerimaan masyarakat terhadap bahasa Melayu tanpa ada intervensi kekuatan politik atau pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu. Disinilah sebenarnya faktor utama tumbuhnya integrasi sosial antar masyarakat di Nusantara saat itu. Pada dasarnya integrasi sosial selalu melibatkan banyak orang atau suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu tidak ada hubungan antara sebuah simbol dengan integrasi individual. Integrasi yang terkait dengan simbol-simbol selalu berhubungan erat dengan integrasi sosial.

Integrasi sosial bisa menguat apabila dalam masyarakat terdapat solidaritas yang kuat antara individu-individu (Durkheim, 1966: 75). Sebab itu, ketika integrasi sosial semakin kuat, suatu kolektivitas biasanya memerlukan simbol tertentu untuk menyatakan keberadaan mereka sebagai sebuah kelompok sosial. Simbol berupa bahasa

Jurnal Lani:Kajian Ilmu Sejarah & Budaya 12 | Page

Melayu misalnya, tersosialisasi keseluruh pelosok Nusantara dan terbentuk lewat relasi antar etnik atau suku sehingga pada gilirannya mempererat hubungan solidaritas yang kuat dalam masyarakat Nusantara. Hubungan solidaritas yang terbentuk pada umumnya melalui aktivitas perdagangan maupun lewat saluran-saluran budaya berupa seni tari, seni musik, pantun, syair-syair, pepatah, dan juga teknologi tradisional. Keberadaan Bangsa Indonesia sampai detik ini tetap ada karena didukung oleh solidaritas kolektif yang kuat, serta didukung oleh berbagai unsur budaya sebagai simbol perekat terutama bahasa Melayu yang kemudian lewat konsensus bersama pada tanggal 28 Oktober 1928 diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dari fibrasi sejarah bangsa, tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Nasionalisme Indonesia sepanjang sejarah tidak terlepas dari solidaritas kolektif yang menyatu karena dilatarbelakangi oleh bahasa yang sama, pengalaman sejarah yang sama, dan didukung oleh budaya yang telah terintergrasi dalam bingkai pluralitas jauh sebelum orang Arab dan Eropa menginjakkan kaki di bumi Nusantara.

Kalimat di atas menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat mengenai keterkaitan antara budaya bangsa, jati diri dan integrasi nasional tidak akan dapat diperoleh tanpa memahami keterkaitan antara simbol-simbol kebudayaan yang bisa menjadi perekat nasionalisme bangsa Indonesia. Selain itu relasi yang terbangun diantara etnis Nusantara adalah lewat berbagai simbol terutama lewat sejarah budaya, dan bahasa sehingga melahirkan gagasan

nasionalisme dan pada gilirannya menjadi perekat bagi setiap generasi pengikutnya. Simbol-simbol sebagai unsur budaya ini kemudian lahir dan menyatu sebagai gagasan yang dituangkan secara formal dan diakui secara kolektif dalam momentum “sumpah pemuda” 28 Oktober 1928.

Disadari sungguh bahwa jauh sebelum sumpah pemuda dilaksanakan, solidaritas yang terjalin melalui simbol-simbol terutama sejarah, budaya dan bahasa juga telah terjalin dalam bingkai Nusantara melalui jalur-jalur perniagaan di seluruh daerah. Simbol Melayu bertumbuh dan berkembang melalui berbagai media, mulai dari sejarah, seni, budaya, bahasa, dan agama, sehingga simbol-simbol tersebut telah masuk merambah jauh ke pelosok/pedalaman, dan setiap tepian pulau, seakan menyapa etnis maupun suku. Ungkapan di atas sama seperti yang dikatakan oleh Lombard dalam tulisannya *Nusa Java Silang Budaya* bahwa pulau, tanjung, dan selat bukan menjadi halangan untuk mengembangkan saluran-saluran budaya, ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Nusantara (Denys Lombard, 2008).

Ungkapan di atas juga mengisyaratkan bahwa melalui saluran bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dalam berbagai aktivitas kehidupan baik secara formal maupun non formal, telah melahirkan solidaritas regional dan mempererat semua suku bangsa, etnis, maupun agama di Nusantara. Bukan hanya itu karena disaat semangat nasionalisme mulai digulirkan diseluruh Nusantara untuk mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, simbol-simbol Melayu juga mempunyai andil yang cukup besar dalam

mensinergikan kekuatan nasional yang berada di pusat perjuangan (*Batavia*) dengan kaum nasionalis yang ada di seluruh Hindia Belanda saat itu. Konektifitas gerakan nasionalisme benar-benar terjalin diantara kaum muda terpelajar yang menggelorakan semangat kebangsaan menuju pembentukan negara bangsa yang merdeka. Itulah sebabnya tulisan ini diberi judul: "Pengaruh Relasi Melayu Nusantara Dalam Mempererat Integrasi Sosial Menuju Pembentukan Negara Bangsa.

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2012). Menurut Rochmat, pada tahapan *pertama*, heuristik, dibutuhkan keuletan tersendiri di samping bekal metodologi yang mantap agar seseorang peneliti mampu menemukan bahan-bahan tertulis, karena tiadanya dokumen berarti tiada sejarah. Seperti pepatah Perancis: *Pas de documents, pas d'histoire* (Saefur Rochmat, 2009). Selanjutnya tahapan *kedua* kritik/verifikasi, terdiri dari kritik intern dan ekstern (Priyadi, 2012) yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjadi suatu fakta sejarah. Tahapan *ketiga*, interpretasi atau penafsiran, sering disebut sebagai biang subjektifitas. Itu sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara (Kuntowijoyo, 2013). Maka interpretasi atau penafsiran dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Tahapan *keempat* adalah

historiografi atau penulisan sejarah.

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Bahasa Melayu Sebagai Simbol Budaya Perekat Suku, Bangsa di Nusantara.

Fungsi kebudayaan sebagai jati diri suatu bangsa berimplikasi positif terhadap pemahaman mengenai hubungan antara kebudayaan dan intergrasi sosial karena hal tersebut merupakan embrio untuk memupuk solidaritas menuju suatu gerakan bersama atau gerakan nasional menuju integrasi dan pembentukan sebuah bangsa. Perlu disadari bahwa dari ingatan/memori kolektif bangsa Indonesia, sesungguhnya integrasi bangsa atau kesatuan bangsa Indonesia yang dicapai merupakan sebuah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang di Nusantara mulai dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun puncak dari integrasi atau solidaritas bersama itu baru dicapai pada masa penjajahan Belanda, ketika seluruh kekuatan solidaritas yang telah terbina berkat adanya peran bahasa Melayu yang mampu untuk menyatukan berbagai suku, etnik, golongan dan kepentingan. Dorongan kuat dari simbol-simbol Melayu terutama bahasa yang memberikan energi positif untuk tumbuhnya Integrasi nasional, menunjukkan bahwa betapa berartinya relasi Melayu terutama untuk membangun rasa solidaritas antara berbagai komunitas di Nusantara saat itu. Banyak pengalaman sejarah yang terjadi di Nusantara silih berganti, dan pada setiap periodisasi kadang-kadang kuat dan kadang lemah. Dalam keadaan yang tidak stabil dan bisa ikut mengancam Integrasi

sosial antar etnik, suku dan golongan di Nusantara pada masa berkuasanya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram, Majapahit, Goa, Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan, maka pada titik ini, simbol budaya Melayulah hadir menjadi perekat jati diri membangun solidaritas dan sekaligus berfungsi menguatkan Intergarasi teritorial.

Dalam sejarah berbagai peristiwa dan pengalaman kolektif pada masa lalu dapat dikenang, dilestarikan, bahkan juga dikembangkan guna memupuk solidaritas yang telah terbentuk sejak masa lampau. Berbagai pengalaman bersama yang diungkap kembali akan membangkitkan pengetahuan bahwa suatu warga bangsa seperti Indonesia merupakan kolektivitas yang dibangun dengan ikatan sosial dan unsur-unsur budaya Melayu baik sejarah, budaya maupun bahasa. Pada kasus Indonesia misalnya, relasi Melayu telah membangun kesadaran berbangsa, dan telah berfungsi menguatkan solidaritas diantara warga bangsa yang kemudian memperkuat integrasi sosialnya. Fenomena saat ini, yang sangat nampak dalam berbagai kehidupan adalah tingginya segregasi dalam bidang budaya, sehingga bisa saja mengancam solidaritas antara masyarakat yang telah terpupuk ratusan tahun itu. Hal itu berarti proses integrasi nasional Indonesia yang terbentuk lewat pengalaman sejarah yang sangat panjang, masih perlu didiskusikan untuk kemudian ditelorkan kepada seluruh komponen bangsa lewat pendidikan, sehingga bentuk Negara yang ada sekarang ini tidak perlu dicari dan dipertentangkan lagi. Dengan demikian, yang perlu dicari hanyalah formula yang tepat untuk

mensosialisasikan sejumlah nilai-nilai positif mengenai pengalaman kolektif dimasa lalu, terutama menyangkut proses terjadinya integrasi nasional agar tetap diimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai konsep maupun teori mengenai proses Integrasi bangsa Indonesia memiliki aneka ragam, tergantung dari titik pandang penulisnya. Seluruh pendekatan yang dikemukakan oleh berbagai ahli, memiliki ciri tersendiri tergantung sudut pandang maupun pendekatan penulis, namun harus diselaraskan dengan pengalaman yang dialami oleh suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Begitu pula dengan proses integrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia harus dikaji, dianalisis dan kemudian dipertimbangkan soal signifikansinya sebagai metode untuk memformulasikan integrasi nasional Indonesia, kepada setiap insan tumpah darah Indonesia. Banyak teori dan pendekatan yang memiliki nilai lebih untuk mengkaji terjadinya integrasi nasional baik yang ditawarkan oleh ahli luar, maupun dalam negeri, diantaranya, *David Brown* yang menjelaskan tentang integrasi Indonesia merupakan karya yang ditentukan oleh elit atau kaum terpelajar (Brown, 2004: 74). Brown menggunakan istilah *Neo Patrimonialisme* dalam kasus integrasi nasional Indonesia. Untuk memahami *Neo Patrimonialisme*, paling jelas dikombain dengan apa yang Weber maksudkan dengan *Patrimonialisme*, karena menurut Weber peran elit sangat berpengaruh terhadap sebuah integrasi sosial. Relevansi pandangan Weber dengan kasus integrasi yang dialami oleh bangsa

Jurnal Lani:Kajian Ilmu Sejarah & Budaya 15 | Page

Indonesia bisa dicermati dari kutipan dibawa ini:

the object of obedience is the personal authority of the individual which he enjoys by virtue of his traditional status. The organized group exercising authority is, in the simplest case, primarily based on relations of personal loyalty, cultivated through a common process of education. The person exercising authority is not a 'superior', but a personal 'chief'. His administrative staff does not consist primarily of officials, but of personal retainers. What determines the relations of the administrative staff to the chief is not the impersonal obligations of office, but personal loyalty to the chief

Dalam patrimonialisme, sistem pemerintahan terbangun lewat ikatan antara pimpinan pemerintah tertentu (ketua adat, raja, sultan) atau orang berpengaruh di mana ia diangkat ke dalam posisi tertentu di dalam kekuasaan pusat. Orang-orang ini punya masa yang mengikutinya berdasarkan loyalitas personal. Jaringan-jaringan patron-klien ini kemudian mengembangkan loyalitas masing-masing yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi nasional kendati hanya elit (patron) yang memahami perubahan sifat tersebut. Disinilah otoritas elit sangat menentukan untuk memainkan peranannya dalam mensosialisasikan integrasi nasional lewat simbol-simbol budaya terutama seperti bahasa Melayu yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah yang nyatanya lebih

cepat terserap karena adanya peran dan relasi elit

b. Budaya Melayu Mempererat Integrasi Nasional

Christine Drake mengutarakan tesisnya tentang empat faktor yang mendorong integrasi nasional Indonesia. Pertama, dimensi historis-politis yang menekankan kepada persamaan nasib selaku rakyat yang terjajah oleh bangsa Belanda, yang kemudian membangun kesadaran bersama untuk mencapai satu tujuan. Dimensi ini lebih terasa tatkala para pendiri negara Indonesia melakukan kegiatan kampanye dan propaganda semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan. Dari dimensi keilmuan, teori yang dikemukakan Darke sangat mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Ernst Renan tentang proses terciptanya sebuah bangsa karena menurutnya rasa nasionalisme bisa tercipta karena adanya dimensi historis, politis dan interaksi antar elemen komunitas politik nusantara lalu kemudian mendorong sejumlah elit untuk membentuk negara Indonesia. Perlu diakui bahwa terbentuknya negara Indonesia karena adanya konsensus elit, bukan sebuah referendum. Namun, elit-elit tersebut kemudian mendiseminasi kesepakatan mereka kepada masing-masing klien mereka (massa masing-masing). Hal ini lumrah saja karena kecenderungan integrasi elit ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di banyak negara lain. Misalnya, Malaysia ataupun Irak dan lain-lain.

Sehubungan dengan dimensi historis-politik, integrasi yang muncul pra kemerdekaan 1945, adalah bukan subordinasi melainkan kesetaraan, Jurnal Lani:Kajian Ilmu Sejarah & Budaya 16 | Page

sehingga masing-masing komunitas politik (daerah-daerah) memiliki derajat otonomi (khususnya dalam hal budaya dan ekonomi) yang tinggi. Masing-masing komunitas politik lokal (daerah-daerah) ini kemudian berkembang menjadi komunitas politik yang berafiliasi sama yaitu satu bahasa, bahasa Indonesia, satu Tanah air, tanah air Indonesia dan satu bangsa, bangsa Indonesia. Komitmen bersatu dalam semangat nasionalisme untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Dimensi lain yang ditawarkan Drake dalam menganalisis kasus integrasi bangsa Indonesia adalah *sosio kultural* diantaranya termasuk atribut-atribut atau simbol-simbol budaya yang sama, bahasa yang sama, agama yang sama, dan kemudian membimbing pada ikatan bersama untuk bersatu di dalam wadah Indonesia. Dimensi ini dianggap lebih dominan pada kasus integrasi nasional Indonesia karena simbol bahasa terutama bahasa Melayu yang terserap dimasyarakat melalui proses sejarah yang panjang dapat diterima oleh para elit lokal maupun kaum terpelajar di setiap daerah. Pada setiap pertemuan baik formal, non formal, para elit selalu menggunakan bahasa Melayu dalam berbagai propaganda semangat kebangsaan.

Dimensi ketiga adalah interaktif, yaitu tingkat kontak atau komunikasi yang terbangun antara orang-orang Melayu dengan setiap suku, bangsa, etnis yang ada di wilayah Nusantara yang kini menjadi Indonesia. Mereka satu sama lain saling berkomunikasi dengan bahasa Melayu pada setiap aktifitas baik perdagangan, transportasi, migrasi, dan diaspora. Kalau dicermati, pola perpindahan

penduduk di Indonesia sudah sedemikian canggih dalam arti hampir disetiap wilayah Indonesia tidak lagi terdapat mono etnis. Hal ini mendorong interaksi antar etnis yang lebih intens dan pada akhirnya mendorong terciptanya kondisi saling memahami antar etnis. Tentu saja, masing-masing etnis akan tetap semaksimal mungkin memelihara adat dan kebiasaan masing-masing sebagai kekuatan *Local Geniusnya*. Namun, jika hal tersebut ditunjang oleh perkembangan pemahaman paradigma multicultural, maka pemeliharaan identitas etnis di wilayah domisili etnis lain tidak akan menjadi persoalan sensitif. Justru, masing-masing etnis memiliki kesempatan untuk mempelajari cara-cara hidup yang lebih baik dari etnis satu dan lainnya untuk perkembangan individualitas mereka masing-masing dan tersosialisasi lewat satu bahasa yang kini dikenal dengan bahasa persatuan.

Tawaran terakhir dari Drake adalah dimensi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar region-region yang ada di Nusantara. Kalau kita menganalisis apa yang dikatakan Drake maka, dapat dikatakan bahwa saling ketergantungan antara suku bangsa dalam dunia perdagangan dimasa lampau, justru memperoleh wilayah besar dengan nama Nusantara. Dimensi keempat ini telah dilalui bangsa Indonesia ketika zaman perdagangan rempah-rempah di kepulauan nusantara yang bisa dilakukan tanpa adanya halangan karena adanya penggunaan bahasa yang sama. (Christine Drake, 2002). Dimensi ekonomi walaupun kurang memiliki tingkat signifikansi yang tinggi dengan faktor bahasa, namun bila dikaitkan

dengan relasi masyarakat disaat melakukan transaksi baik dalam pola barter maupun yang lainnya, pasti bahasalah yang sangat diperlukan untuk memperlancar aktifitas perdagangan. Pada titik inilah bahasa Melayu sangat berperan dalam relasi ekonomi masyarakat Nusantara saat itu karena telah menjadi bahasa resmi yang dipergunakan pada saat melakukan perdagangan. Dewasa ini bangsa Indonesia sangat beruntung karena bahasa Indonesia memberikan banyak kemudahan kepada pelaku ekonomi sehingga perekonomian Indonesia dapat bertumbuh dengan baik tanpa halangan apapun. Namun disatu sisi ada kelemahan yang dijumpai hampir disetiap pelaku bisnis intertem khususnya mereka yang menggunakan bahasa gaul karena merusak tata bahasa Indonesia. Kata kata seperti *Gua atau gue, lu atau loe, nyokap, bokap, gaul, jutek, kepo, palbis* dan lain sebagainya

c. Konsensus Untuk Melegitimasi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Persatuan

Bahasa Indonesia yang kini menjadi bahasa resmi Indonesia tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang panjang. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa persatuan melalui konsensus bersama atau kesepakatan bersama untuk menjadikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah *lingua franca* yang menjadi bahasa pengantar hubungan penduduk antar pulau-pulau nusantara. Bahasa Melayu sendiri, seperti telah dikemukakan sebelumnya, menyerap sejumlah unsur budaya yang pernah berkembang di Nusantara yaitu

kebudayaan Hindu, Budah, Islam, dan kebudayaan Barat. Kelebihan bahasa Melayu adalah maampu bertahan diantara arus budaya Hindu Budha yang menggunakan bahasa Sansekerta dan Huruf Palawa secara formal maupun non formal. Begitu pula dengan bahasa Arab maupun arus kebudayaan barat terutama bahasa Arab, Latin dan Belanda. Bahasa Melayu di abad ke 16 -17 sudah dipergunakan oleh orang-orang Eropa untuk kepentingan praktis yaitu penyiaran ajaran agama Kristen, perdagangan, pendidikan maupun aktifitas lainnya (Kees Groenboer 1995).

Dalam tulisan Jan Huygen Linschoten berjudul *Itinerario*, yang dikutip oleh A. Teeuw, menjelaskan bahwa “ yang tidak berbahasa Melayu di Hindia-Belanda, dia tidak bisa turut serta dalam berbagai kegiatan. Ia menambahkan bahwa bahasa Melayu telah sedemikian masyurnya dikawasan ini. Lebih daripada itu, bahasa Melayu telah dianggap sebagai bahasa yang se hormat-hormatnya dan sebaik-baiknya dari segala bahasa di Timur. Setiap orang yang ingin ikut serta dalam kehidupan antar bangsa dikawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa Melayu” (A Teeuw : 1994).

Rujukan menarik dari Karya Francois Valentijn berjudul *Oud en Neuw oost Indien* 1713 yang terdiri dari lima jilid, pada jilid ketiganya ia memaparkan sejumlah hikayat dan karya sastra lainnya yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Menurutnya karya- karya itu sudah diketahui oleh penduduk. Jadi karya-karya bahasa Melayu waktu itu sudah begitu dikenal juga oleh masyarakat etnis yang bukan Melayu. Di dalam gambaran tentang Malaka, pendeta Francois Jurnal Lani:Kajian Ilmu Sejarah & Budaya 18 | Page

Valentijn yang mengunjungi Malaka selama dua windu (1685-1695) dan kemudian kembali ke Ambon tahun (1707-1713), mengungkapkan pandangannya tentang bahasa Melayu pada masa itu sebagai berikut:

“Bahasa mereka disebut bahasa Melayu,...Bahasa ini tidak hanya dipergunakan di daerah mereka, tetapi juga dipergunakan dimana-mana untuk bisa saling mengerti dan untuk dipakai dimana pun diseluruh Hindia dan semua negara di Timur, seperti halnya dengan bahasa Perancis atau Latin di Eropa....Orang yang bisa bahasa itu tidak kebingungan karena bahasa itu dikenal sampai dimengerti. Orang yang tidak bisa berbahasa ini akan dianggap sebagai orang timur yang kurang pendidikan”

Dengan demikian, Bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa yang penggunaannya bukan *up to bottom* melainkan *bottom to up*. Bahasa Indonesia disusun secara induktif, bukan deduktif. Sehingga dapat dinyatakan Bahasa Indonesia adalah milik semua orang Indonesia, bukan hanya milik orang Sumatera, Kalimantan, Ambon, Papua, atau Jawa saja. Yang menarik dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dalam konteks integrasi nasional, Indonesia belum pernah mengalami persengketaan soal bahasa nasional ini seperti yang menimpa Malaysia, Pakistan, ataupun Filipina. Integrasi nasional tidak akan bertahan jika suatu budaya, yang karena punya pendukung terbesar, lantas menegasikan yang kecil. Hal ini

sangat krusial bagi Indonesia yang punya ratusan bentuk budaya lokal spesifik.

Masing-masing budaya cenderung mempertahankan eksistensinya dan menyikapi upaya penyeragaman budaya sebagai bentuk agresi. Indonesia tidak akan bertahan lama jika bentuk-bentuk agresi budaya dibiarkan terjadi. Dalam konteks ini paradigma masyarakat majemuk perlu diganti dengan paradigma multikultural. Paradigma masyarakat majemuk mengandung bias kolonialisme Barat yang awalnya dimaksudkan demi memecah masyarakat jajahan berdasarkan garis budaya. Paradigma masyarakat majemuk perlu diganti dengan paradigma multikultural yang di Indonesia sesungguhnya telah diwakili semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Mengutip pandangan Imam Prasodjo tentang *Bhineka Tugal Ika* yang dibangun pada masyarakat Indonesia bahwa, pluralisme/*Kebhinnekaan-Tunggal Ikaan* tidak semata-mata keragaman, tetapi merupakan keterlibatan energetik dengan keragaman yang ada dalam masyarakat (*the energetic engagement with diversity*). Bila keragaman dapat menciptakan kantong-kantong sosial-budaya di mana satu sama lain tak terjadi interaksi, maka pluralisme justru terjalin hubungan yang intensif satu sama lain untuk menjalin saling pemahaman. *“Diversity is a given, but pluralism is not a given; it is an achievement.”*

D. Simpulan

Ketika, integrasi nasional muncul akibat pemerintah dibentuk berdasarkan atas perasaan kesatuan nasional. Integrasi nasional tidak akan tercipta jika perasaan tersebut belumlah terbangun

lewat simbol-simbol Melayu. Untuk itu, masalah bahasa persatuan, ideologi nasional, merupakan komponen penting di dalam integrasi nasional. Pemerintah memiliki tugas menjamin hal-hal tersebut agar tersosialisasi, baik secara teori maupun praktek. Tidak boleh diabaikan begitu saja terutama soal simbol-simbol Melayu dalam terminologi kesatuan nasional. Namun tetap saja tanpa terciptanya (atau kesungguhan untuk menciptakan) kemakmuran dari pemerintah simbolisme kesatuan nasional, ideologi nasional hanya akan menjadi pepesan kosong. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, adalah suatu konsep yang bagus dalam rangka menciptakan rasa persatuan dan hubungan antar elemen pembentuk bangsa yang berbeda. Namun, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika hanyalah pepesan kosong tatkala pemerintah dan masyarakat sipil tidak mampu mewujudkannya sebagai praksis politik. Pembangunan ekonomi dan distribusi kesejahteraan adalah salah satu nilai Pancasila yang cukup krusial untuk digarap dan selama ini terbukti bukan menjadi fokus utama setiap pemerintahan Indonesia. Simbolisme jargon hanya bisa bertahan jika kenyataan telah menunjukkan hal yang serupa dengan jargon tersebut.

Integrasi nasional berhubungan dengan masalah representasi politik. Negara yang terbangun di sekujur garis primordial berbeda memunculkan sensitivitas tinggi warganegara atas aspek ini. Agama, etnis, region, merupakan unsur primordial yang perlu diperhatikan representasi politiknya melangkah di jalur yang benar dengan memindahkan bobot otoritas politik ke tingkat

daerah. Harapannya adalah, pemerintah daerah dapat secara langsung meningkatkan kemakmuran di wilayahnya. Namun, sebagai regulator utama, pemerintah pusat harus mampu berposisi sebagai strong state bukan weak state. Dalam representasi politik, Indonesia sudah sangat liberal bahkan kini kesulitan dalam hubungan antara pusat dengan daerahnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Lombard, Denys, (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu (Bagian II Jaringan Asia)*. Jakarta: Gramedia
- Anthony Harold Birch, (1989). *Nationalism and National Integration*. London: Routledge
- A. Teeuw, (1994). *Indonesia Antara kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Christine Drake, (2013). *Raiding the Land of the Foreigners: The Limits of the Nation on An Indonesian Frontier*. Princeton University Press
- David Brown, (2004). *The State and Ethnic Politics in South East Asia*. CRC Press
- Durkheim. E, (1966). *Suicide A Study in sociology*. Neu York The Free Press
- Harimurti Kridalaksana, (1991). *Pengantar Tentang Pendekatan Historis Dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- James.P. Speadly, (2000). *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Kees Groenboer, (1995). *Jalan Ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950*. Jakarta: Erasmus Taalcentrum.
- Kuntowijoyo, (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jurnal Lani:Kajian Ilmu Sejarah & Budaya 20 | P a g e

- Yogyakarta: Tiara Wacana
- Prasodjo, Imam, (2014). *Membangun Komunitas Budaya Kreatif Beragam Dalam Bingkai Kesatuan*. Makalah disampaikan pada lokakarya budaya Nasional di Serang Banten
- Priyadi, Sugeng, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Rochmat, Saefur, (2009). *Ilmu Sejarah Dalam Prespektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu